

## **Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (*Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal*)**

**Muhammad Sirajudin Fikri, Nico Oktario Adytyas**  
**Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora**  
**Muhsirajuddinfikri\_uin@radenfatah.ac.id, Nadytyas@gmail.com**

### **Abstract**

The findings in the study are that there are several local values that are still used and are still a reference for the community in the process, daily life such as peddling, charity, celebration, mutual cooperation, *ngobeng*. This value is believed to still be a tool / weapon to reduce all problems in the community. Then, local values are still believed to be a means of unifying how the stakeholders, especially the executive and the legislature, show their role, especially in issuing policies, because the policy or legal umbrella is the most appropriate realization to be issued.

Keywords: local value, Palembang, local

### **1. Pendahuluan**

Kebangkitan populisme beriring sejalan dengan politik proteksi kepentingan dalam negeri. Hal ini terlihat pada beberapa negara di dunia sebut saja Amerika Serikat dengan Donald Trump-nya yang fenomenal, keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (brexit), menguatnya politik dan kandidat dari sayap kanan di Perancis, kepopuleran Presiden Duterte dengan kebijakan-kebijakan politik dalam negeri Filipina yang dinilai terlalu proteksionis, dan tak ketinggalan Presiden Joko Widodo dengan aksi blusukan dan pro rakyat kecil sejak beberapa tahun silam juga merupakan bagian dari praktik-praktik kebangkitan populisme. Politik populisme dinilai sebagai jawaban dan solusi mendesak di tengah kondisi politik-ekonomi dunia dan regional yang tak terkontrol dan cenderung krisis. Pemimpin masing-masing negara dipaksa untuk lebih berpihak kepada rakyat ketimbang terperangkap dengan konsep dan jargon humanis yang berserakan dalam kancah internasional (baca: pluralisme, pro imigran/pencari suaka, mendukung penegakan Hak Asasi Manusia, peduli buruh, dan seterusnya). Presiden dan calon presiden cenderung lebih disukai ketika mendahulukan keamanan dan keselamatan rakyat sipilnya ketimbang sibuk mengurus orang asing yang masuk ke negara mereka baik legal maupun illegal.

Kebangkitan politik populisme ini menarik dicermati dalam kerangka konsolidasi demokrasi. Hal ini tidak saja dapat dilihat di luar negeri tapi juga di dalam negeri sendiri, Indonesia. Gaya politik blusukan Jokowi yang pro rakyat kecil dapat dikatakan belumnya memberikan hasil maksimal, karena masih ada di

beberapa daerah, rakyat yang etnis, suku, dan agamanya yang dinilai dan dianggap minoritas mendapat perlakuan yang diskriminatif. Politik populisme pada satu sisi seakan-akan membangkitkan semangat rakyat yang selama ini ditindas atau tertindas oleh rezim otoritarian Orde Baru. Sementara di sisi lain, gaya politik ini terjebak pada suara-suara mayoritas yang juga pada saat bersamaan terkesan menyukai menindas kelompok minoritas. Suara-suara mayoritas, pada banyak kasus, cenderung menguntungkan kelompok status quo. Padahal, konsolidasi demokrasi menghendaki menghilangkan, paling tidak menipiskan kuasa absolut dari masing-masing kelompok dengan membagi model kekuasaan (baca *trias politica*: eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

Hal ini, pada beberapa daerah juga terjadi. Dalam kajian politik, kita begitu akrab dengan politik dinasti yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Politik dinasti berlangsung tidak saja dikarenakan oleh segelintir orang kuat yang ada dan berkuasa di daerah tersebut, melainkan lemahnya kontrol politik atas kekuasaan mereka, dan belum maksimalnya kesadaran atau pendidikan politik pada masyarakat di daerah. Ketiga hal ini juga berkaitan dengan konteks sosial-kultural-politik di mana dinasti politik tumbuh dan menguat. Kebiasaan budaya atau nilai (*social values*) yang dianut jika cenderung permisif –untuk tidak mengatakan belum melek politik- dengan kuasa segelintir orang, dinasti politik akan tetap eksis dan abadi –tentu saja ini bukanlah faktor tunggal dan tidak bekerja secara monolitik. Potensi praktik dinasti politik cenderung terbuka lebar di daerah mana saja di Indonesia. Paling tidak, beberapa data dari tren kepemimpinan beberapa kepala daerah- seorang pemimpin daerah diasumsikan mampu menjabat sekurangnya dua periode di daerah yang sama. Jika pada masa dua periode berakhir, sang aktor politik akan berpindah ke daerah lain untuk mencalonkan diri. Dalam praktik yang tampak, ini bisa saja bukan bagian dari dinasti politik, akan tetapi fenomena ini mengundang jalan-jalan yang terbuka lebar untuk melakukan dinasti politik, dengan cara-cara yang paling mendasar.

## **2. Nilai lokal, penghambat atau pendukung demokrasi**

Nilai-nilai kultural yang masih tetap dipegang secara kuat oleh masyarakat Palembang, dalam hal ini kita sebut sebagai istilah “wong kito” terus diterapkan dengan berbagai cara dan berbagai macam situasi, dalam berbagai kesempatan ada banyak kegiatan yang secara tidak langsung telah menerapkan nilai-nilai lokal dalam proses bermasyarakat. Nilai kultural yang terus diterapkan secara tidak langsung akan terus memperkuat hubungan antar masyarakat asli Palembang dan lebih jauh akan terus menjaga kesakralan nilai-nilai kultural masyarakat asli Palembang.

Nilai-nilai kultural yang sudah dijelaskan di atas menggambarkan bahwa, ternyata masih banyak nilai-nilai atau kearifan lokal yang menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan hidupnya di tengah masyarakat, nilai-nilai lokal yang masih bisa “diselamatkan” di tengah maraknya budaya luar yang lebih menggiurkan masyarakat karena memang terkesan lebih modern, lebih kekinian dan lebih segalanya, dan hal tersebut merupakan efek dari keran informasi yang

dibuka sangat luas, dan juga akan membentuk budaya politik di setiap daerah. Model-model budaya politik lokal ini berkembang sebagai reaksi dari adanya tekanan sosial, politik, dan ekonomi. Ia lahir dari adanya interaksi antara pola tingkah laku dan pola untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Sementara itu, sistem birokrasi ada di tengah-tengah pola tingkah laku masyarakat tersebut (Priyatmoko, 1991:252). Budaya politik lokal tumbuh dan berkembang pada kelompok-kelompok masyarakat yang mewariskan nilai-nilai positif yang sama, sehingga harus dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sistem birokrasi di daerah (Priyatmoko, 1991:254). Hal ini dikarenakan budaya politik lokal tersebut, mempunyai nilai sejarah sebagai bentuk perjuangan untuk membentuk sistem politik, mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, dan juga adanya aspek-aspek heroik yang membanggakan.

Budaya politik lokal yang berkembang di Indonesia adalah suatu warisan sosial yang terbentuk melalui perjalanan sejarah. Budaya politik lokal tersebut terbentuk dari serangkaian kepercayaan, kebiasaan, dan struktur sosial yang berkaitan dengan kehidupan politik masyarakat. Kepercayaan, kebiasaan, dan struktur sosial itulah yang menagaskan pola untuk bertingkah laku masyarakat, mana yang seharusnya dan tidak seharusnya untuk dilakukan. Batasan-batasan dalam budaya tersebut dapat berasal dari agama, adat istiadat ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Budaya politik lokal ini, dapat dilihat pada kecenderungan perilaku yang tampak pada kehidupan politik masyarakat lokal itu sendiri. Perkembangan budaya politik lokal di Indonesia adalah sebagai reaksi adanya tekanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat supralokal. Dalam hal ini, budaya politik lokal dipengaruhi oleh sistem kultural dan kepercayaan atau agama (Sjamsuddin, 1989:36-37). Ia berkembang dalam komunitas-komunitas tradisional yang mempunyai nilai-nilai positif yang patut dikembangkan dan tetap dipertahankan dalam penyelenggaraan sistem birokrasi lokal di daerah.

Suatu sistem politik juga akan mempengaruhi kebudayaan setiap daerah, juga akan mempengaruhi bagaimana pola birokrasi yang diterapkan dan juga sistem demokrasi juga. Sistem demokrasi lokal adalah cerminan budaya politik suatu daerah, bahkan menjadi aspek terpenting karena sistem birokrasi mempengaruhi seluruh bidang kehidupan politik masyarakat. Budaya demokrasi mempunyai hubungan yang kuat antara budaya politik lokal dikarenakan pertama, birokrasi adalah institusi politik; kedua, budaya demokrasi mempunyai peranan penting dalam upaya memahami elit politik; dan ketiga, keberhasilan pembangunan daerah dipengaruhi oleh peranan sistem birokrasi setempat yang dijalankan.

Ada beberapa argumen yang diutarakan oleh para responden terkait bisa atau tidaknya tidak suatu nilai lokal dapat mengubah sistem politik lokal, ada beberapa anggapan yang melihat bahwa nilai lokal masih banyak digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, namun dalam konteks masih atau tidak mempengaruhi sistem politik lokal ini, mereka meragukan hal tersebut, karena pada umumnya saat ini, sistem politik lokal yang digunakan sudah melupakan hal-hal yang berbau ke lokalitas, terutama dalam tata kelola kemudian penyelesaian masalah dsb. Sistem politik lokal justru berkiblat pada sistem tata kelola yang

disanjung-sanjung oleh masyarakat dunia seperti *Good Governance*. *Good Governance* merupakan pola yang tata kelola yang dikemukakan oleh pihak-pihak seperti UNDP, PBB, Bank Dunia, dengan tujuan untuk membuat tata kelola dan pengaturan pemerintah itu lebih efektif dan lebih berkualitas, namun hal tersebut justru kadang kala dapat menggerus hal-hal yang berbau tradisional di setiap daerah, karena pada dasarnya setiap daerah pasti memiliki cara ke khas an masing masing dalam mengelola daerah mereka, dan hal tersebut merupakan kearifan lokal, yang sbetulnya harus dijaga dan tidak bisa dipaksakan/ digantikan dengan sistem yang berbau modern yang kadang kala tidak bisa di implementasikan dengan mudah oleh masyarakat lokal, banyak contoh di masyarakat Indonesia yang masih berada pada budaya politik parokial, mereka masih sedikit sulit untuk menerima sistem-sistem yang dibangun dan kadang kala mereka tidak dapat se detail se profesional aturan aturan dalam *good governance* tersebut dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

Banyak rasa kurang percaya kepada elit politik lokal yang masih menjual isu isu nilai lokal yang mereka bawa guna mendapatkan simpati warga lokal, terutama di beberapa daerah yang masih kuat unsur-unsur kultural yang masih kental di tengah masyarakat. Beberapa masyarakat Palembang beranggapan nilai lokal bisa sangat berpengaruh dalam suatu sistem politik masyarakat, terutama bagaimana ketika mereka dimanfaatkan hanya pada saat- saat tertentu dan setelah itu mereka akan dilupakan seiring tumpu kekuasaan yang telah dimiliki oleh kontestan pemilu. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bagaimana nilai lokal/ kearifan lokal sangat memungkinkan bagaimana perubahan suatu sistem politik lokal juga, dan dampak yang lebih besar juga akan mempengaruhi sistem birokrasi yang ada dalam suatu daerah. Sehingga tidak bisa dipungkiri dan dihindarkan ketika budaya birokrasi dan budaya politik setiap daerah berbeda tergantung perkembangan budaya politik itu sendiri di setiap daerah.

Nilai-nilai kultural yang dipeercayai para masyarakat lokal, juga berdampak pada pola pikir elit lokal, beberapa penelitian terdahulu juga mengatakan ada beberapa kejadian di beberapa daerah yang melihat bahwa penguatan politik Identitas di ranah lokal dapat merubah suatu sistem politik Habodin, Muhtar (2012), memberikan gambaran yang terjadi di beberapa daerah adanya isu-isu lokalisme yang dapat menggiyang kestabilan pemerintah, salah satunya yang digambarkan di Pekanbaru, adanya isu isu putra daerah yang harus memimpin dalam suatu daerah membuat beberapa perubahan terutama dalam pemerintahan, pada era orde baru pemimpin daerah semua dikuasai dan ditentukan oleh pusat, ada pergerakan yang dilakukan oleh para elit lokal, untuk mengusung calon gubernur yang berasal dari putra daerah, dan hal tersebut berhasil dilakukan, pada akhirnya terpilihlah salah satu putra daerah. Hal tersebut menjelaskan dan menggambarkan bahwa suatu isu lokal dapat merubah peta politik dan dapat merubah sistem politik suatu daerah. Masih banyak contoh lain di berbagai daerah yang dapat menggambarkan bagaimana isu lokal dapat menjadi senjata yang ampuh dalam merubah suatu sistem politik, karena tekanan-tekanan yang berasal dari daerah tidak bisa dikesampingkan kekuatannya.

partai sebagai lembaga publik adalah niscaya.

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam arena pertarungan seperti Indonesia banyak yang saling beradu, berkompetisi mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka yang lapar menjadi tameng akan prinsip kejayaan yang dicoba ditawarkan. Kalangan elit tentu saja memanfaatkan situasi seperti ini dan juga turut dinikmati oleh masyarakat kelas bawah, *money politic* dan korupsi menjadi kendala yang menarik untuk disinggung dengan problematika masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam politik yang masih digerakkan oleh uang menjadikan arena demokrasi Indonesia sebagai sebuah rimba politik. Siapa yang banyak uang dialah yang berhak menang. Tapi hal itu tidak menjadi jaminan bagi kemajuan suatu bangsa kedepan.

Pengaruh feodalisme dan paternalistik. Di Indonesia feodalisme digunakan untuk merujuk pada perilaku-perilaku negatif yang mirip dengan perilaku para penguasa yang lalim, seperti 'kolot', 'selalu ingin dihormati', atau 'bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan'. Kuatnya feodalisme di masa lalu membuat orang enggan untuk mengeluarkan pendapat atau pikiran yang mungkin berbeda, apalagi bertentangan, dengan pikiran orang yang dianggap lebih tinggi kedudukannya. Sebaliknya, orang mengabaikan pendapat dan pikiran orang lain yang berada dalam posisi yang dinilai lebih rendah dari posisinya sendiri. Masih lekatnya kultur paternalistik dengan pola hubungan patron-klien. Kepemimpinan karismatis-paternalistik, baik struktural maupun kultural masih menempati grafik puncak dalam peringkat pola-pola kepemimpinan di Indonesia. Kultur dan struktur paternalistik ini memposisikan hubungan antarmanusia secara vertikal. Interaksi antarmanusia bergerak dari atas ke bawah. Kondisi ini kian membenarkan tesis George McTurnan Kahin dalam bukunya "Nationalism and Revolution in Indonesia" (1952). Menurut Kahin, hambatan terbesar bagi demokrasi di Indonesia adalah tabiat rakyatnya yang terlampaui menunggu arahan dari atas. Rakyat lebih banyak menunggu petunjuk dari atas.

Sikap pesimisi dan skeptic terhadap demokrasi. Para penganut teori konspirasi cenderung memandang bahwa apapun di dunia sudah dirancang sedemikian rupa dan masyarakat dunia menjadi korban atas skenario besar tersebut. Demokrasi dianggap menjadi bagian dari skenario besar yang ditawarkan oleh Negara-negara barat terhadap dunia. Ada orang berpendapat bahwa masyarakat Barat yang melahirkan demokrasi mempunyai budaya yang berbeda dari budaya Indonesia. Ini dipakai alasan oleh orang Indonesia yang tidak setuju dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Bahwa budaya berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi adalah benar. Akan tetapi dalam setiap budaya dapat dikembangkan demokrasi. Memang kemudian demokrasi tidak akan presis sama di lingkungan budaya yang berbeda.. Demokrasi di Jepang tidak sepenuhnya sama dengan yang ada di Amerika Serikat karena budaya Jepang dan Amerika berbeda. Jangankan antara budaya Timur dan Barat seperti itu, demokrasi di Perancis dan Inggris saja berbeda padahal sama-sama bangsa Barat. Namun

dalam semua perbedaan yang ditimbulkan oleh perbedaan budaya tetap inti demokrasi selalu ada, yaitu bahwa yang berdaulat di negara itu adalah rakyat.

### 3. Nilai Kultural dan Politik Praktis

Politik praktis dapat diidentikan dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, pemilihan daerah secara langsung dapat menimbulkan banyak efek, namun hal tersebut untuk saat ini merupakan jalan terbaik untuk representasi masyarakat, karena konsep demokrasi yang diteapkan dengan cara *one man one vote*. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakilwakil rakyat di parlemen maupun pemimpin eksekutif di tingkat nasional dan lokal. seperti presiden dan gubernur.

Politik praktis yang dilakukan oleh setiap politisi memberikan kesan yang beragam kepada masyarakat, banyak janji janji yang diberikan oleh politisi guna mendapatkan simpati masyarakat dan mendapatkan apresiasi di tengah masyarakat. Pelestarian aset-aset lokal kemudian mengembangkan masyarakat lokal merupakan isu rutin yang dibawa oleh para politisi untuk menarik masyarakat untuk memilih mereka, dan hal tersebut merupakan hal yang sah saja dilakukan, karena komunikasi politik diwujudkan dalam program-program yang terus diperkenalkan di tengah masyarakat, program tersebut akan terjual secara laris bila disandingkan atau dibenturkan pada daerah-daerah yang masih kental menggunakan nilai-nilai kultural dalam kehidupan sehari-hari. Penyelenggaraan pemilu harus sama-sama diawasi oleh semua pihak, dengan harapan dapat terselenggaranya pemilu yang tanpa cacat. Beberapa Indikator pemilu dapat dikatakan berkualitas adalah Penyelenggaraan Pemilu harus memperhatikan HAK ASASI MANUSIA yaitu pemenuhan hak politik seseorang, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih. Pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, Pemilu juga harus diselenggarakan dengan taat pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Pertimbangan masyarakat dalam memilih calon pemimpinnya dengan pertimbangan bahwa orang tersebut memiliki perhatian yang jelas kepada konstituennya terutama tentang perhatian mereka terhadap pemberdayaan orang lokal dan nilai lokal menjadi salah satu acuan mereka dalam memilih, dan hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar bagi setiap orang dalam memilih siapa yang menjadi wakil mereka di pemerintahan, beberapa responden juga mempercayai bahwa masih banyak alasan konstituen memilih eksekutif maupun legislatif. Mereka beranggapan ada faktor-faktor lain yang juga dominan dalam mempengaruhi seseorang dalam memilih salah satunya adalah peran media dalam membentuk pola pikir masyarakat, selain itu masyarakat juga berpikiran bahwa

karakteristik orang yang akan mereka pilih lebih kepada alasan sosiologis dimana mereka akan memilih orang-orang yang berasal dari daerah tersebut tanpa memikirkan program-program apa yang mereka gunakan.

Berbagai macam pertimbangan seseorang dalam memilih pilihannya tidak dapat disalahkan ataupun diberikan label salah atau benar, tetapi bila kita konteks kan dalam pembahasan ini bagaimana nilai kultural menjadi pertimbangan atau tidak seseorang dalam memilih seseorang, beberapa responden mengatakan bahwa ada kalanya orang terpengaruh untuk memilih seseorang apabila orang-orang tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kedaerahan dan berbau kultural, karena masyarakat daerah masih beranggapan bahwa, ketika seseorang tau dan menghayati suatu kebudayaan daerah tersebut, maka secara tidak langsung mereka juga pasti akan peduli terhadap masyarakat lokal juga. karena adanya kesamaan tujuan, etnis, bahasa suku maupun budaya mereka juga percaya akan keniscayaan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan hal yang wajar, dan harus tetap bersatu dalam perbedaan.

Tahun-tahun politik seperti sekarang ini menjadi momentum bagi orang-orang yang ingin menaikkan popularitas mereka di tengah masyarakat dengan, berbagai macam cara, orang-orang mendadak menjadi orang yang paling peduli tentang kedaerahan, orang-orang mendadak menjadi orang yang paling mengerti akan kebudayaan yang dipercayai oleh masyarakat, kebudayaan dianggap sebagai urusan seremonial saja yang akan diingat ketika ada hajatan-hajatan tertentu tanpa dilihat bagaimana mempertahankan kebudayaan itu, identitas-identitas kebudayaan hanya keluar ketika orang butuh diperkenalkan dengan identitas konstituenya. Banyak sekali orang yang tiba-tiba menggunakan songket, banyak orang berfoto menggunakan tunjung (aksesoris kepala orang Palembang), mereka berbondong-bondong ingin menampilkan identitas-identitas yang sebenarnya setelah itu akan mereka lupakan.

Pola komunikasi yang dibangun oleh para politisi diharapkan tidak menyinggung atau menerobos batasan-batasan nilai-nilai yang dipercayai oleh masyarakat umum di tingkat lokal, karena selama ini masyarakat Palembang menilai banyak orang yang menggebu-gebu ingin memperjuangkan nilai-nilai masyarakat Palembang, namun ketika kampanye-kampanye memperkenalkan diri di masyarakat tidak mencerminkan hal tersebut, sehingga nilai-nilai yang digaungkan akan begitu saja hilang di tengah masyarakat. Karena pada saat ini banyak politisi mengadopsi cara-cara kampanye politik yang di adopsi dari luar negeri, sedangkan hal tersebut justru menjadi kontradiksi di masyarakat terutama masyarakat yang masih awam dengan budaya-budaya politik terbaru. Hal tersebut memang lumrah saja di tengah era modernitas di semua aspek kehidupan masyarakat, namun para politisi seharusnya dapat lebih lihai untuk melihat mana yang bisa diterapkan dengan penuh, dan mana yang hanya bisa diterapkan sesuai dengan masyarakat yang menjadi target suara dari para politisi tersebut. tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan dari seseorang politisi dalam mengkampanyekan programnya dan mentransformasikan pikiran dan program-programnya tidak terlepas dari berhasilnya para politisi untuk berkomunikasi di tengah masyarakat, dapat diasumsikan bahwa nilai-nilai yang dibawa oleh politisi tersebut dapat diterima dan mungkin selaras dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat.

Schumpeter menggariskan bahwa metode demokratis adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat dalam pemilu. Perjalanan sederetan pemilukada yang telah digelar di sejumlah daerah di Indonesia ternyata tidak selalu berjalan dengan baik, bahkan konflik kerap mewarnai dalam proses pelaksanaannya. Pemilukada bagi sebagian pihak dipandang sebagai sebuah mekanisme yang amat mahal dalam mencari pemimpin dilembaga eksekutif pada level lokal, hal ini diasumsikan dengan tingginya dana keuangan yang harus dialokasikan pada ajang momen pemilu bagi para kontestan, tingginya dana keuangan ini ditengarai sebagai kekuatan untuk dapat menciptakan partisipasi politik warga dalam pemilukada. Terhadap asumsi ini, benar jika demokratisasi membutuhkan partisipasi politik warga, akan tetapi demokrasi tidak menyaraknkan penggunaan kekuatan uang dalam menciptakan partisipasi tersebut melainkan demokrasi mengajarkan untuk menciptakan partisipasi secara sadar tentang hak dan kewajiban warga negara salah satunya yakni memilih pemimpin.

Jika saja partai politik berikut “mesin-mesin” yang ada pada partai tersebut berkerja tidak hanya menjelang pemilukada maka tentu tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan kepada warga (pemilih), jikapun hal-hal yang menyulitkan masih saja dapat dijumpai dalam menciptakan partisipasi politik warga secara “sadar” maka hal yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja partai dalam struktur formal pemerintahan, apakah telah terealisasi visi misi ataupun janji-janji di masa kampanye pemilukada sebelumnya, jikapun telah terealisasi maka pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar terealisasi bagi kepentingan warga secara luas. Kondisikondisi evaluatif seperti inilah yang kerap dikesampingkan partai politik beserta calon terpilihnya dalam memimpin pemerintahan, sehingga kedepan partai politik maupun kontestan manapun akan mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan kepada warga terlebih untuk menciptakan partisipasi politik warga di pemilukada. Terhadap kondisi ini, para kontestan beserta partai politik mensiasatinya dengan memberikan tawaran-tawaran menarik berupa uang, barang ataupun jabatan kepada warga agar targetnya semula meningkatkan partisipasi politik warga berubah derastis menjadi keberpihakan warga.(Sinaga:2012)

Dalam sub bab ini menenkankan bahwa, akan selalu beriringan yang antara politik praktis dalam hal ini pemilu legislatif, pemilu Presiden, pemilihan Bupati dan Gubernur dsb. Karena dalam sub bab ini akan membahas tentang bagaimana penelusuran kearifan lokal dalam hubungannya dengan pemilu dan demokrasi, karena diakui atau tidak politik praktis ditingkat nasional akan membawa dampak juga kepada dinamika yang ada di daerah, dan hal tersebut juga harus disikapi dengan benar dan baik, sehingga apapun yang terjadi di ranah politik nasional juga akan berdampak pada ranah lokal. Dinamika politik praktis juga tidak bisa dikesampingkan akan dampak yang lebih besar lagi terutama apalagi dilihat dari sisi bagaimana perkembangan teknologi yang semakin pesat, pendidikan masyarakat kota Palembang yang semakin tinggi juga akan menciptakan dampak negatif maupun positif, dampak positifnya adalah membuat kedewasaan pendidikan politik masyarakat Palembang juga semakin dewasa,

sehingga perbedaan dalam suatu pilihan politik, atas dasar apa mereka memilih wakil mereka di pemerintahan bukan menjadi pemisah antar satu kelompok dan lainnya, dan pada akhirnya pemilu dapat dimaknai sebagai pesta demokrasi yang sesungguhnya dan dapat memberikan perubahan kepada masyarakat lokal dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dan itu merupakan esensi sesungguhnya dari pelaksanaan pesta demokrasi yang ada di semua negara..

#### **4. Nilai kultural dan konsolidasi penguatan Demokrasi Lokal**

Nilai kultural yang telah dibahas secara komprehensif diatas menggambarkan bahwa masyarakat asli Palembang masih menggunakan nilai nilai lokal dalam proses kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menjadi suatu sisi yang harus dipenuhi dan menjadi kekuatan baru dalam konsolidasi Demokrasi lokal, budaya politik lokal pada setiap daerah memiliki karakteristik berbeda-beda perbedaan dari setiap budaya politik ditentukan perjalanan hidup dari berbagai dinamika. Dalam suatu masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya didominasi oleh karakteristik yang bersifat kognitif akan terbentuk budaya politik yang parokial. Sementara, dalam sebuah masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya diwarnai oleh karakteristik yang bersifat afektif, akan terbentuk budaya politik yang bersifat subyektif. Akhirnya, masyarakat yang memiliki kompetensi politik yang tinggi, di mana warga masyarakat mampu memberikan evaluasi terhadap proses politik yang sedang berjalan, akan terbentuk sebuah budaya politik yang bersifat partisipatif. (Almond:1963).

Nilai lokal diharapkan terus dijaga terus dilestarikan dengan tujuan akhir dapat dirasakan hingga turun-temurun, karena banyak manfaat yang dapat diambil dari nilai lokal yang terus dijaga kelestariannya, beberapa fungsi atau manfaat yang dapat kita ambil adalah menurut Prof Nyiman Sirtha (dalam Sartini 2004 112:113) Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep *kanda pat rate*. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada pura Panji. Berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan Bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat. Bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian. Bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara Ngaben dan penyucian roh leluhur. Bermakna politik, misalnya upacara *ngangkuk merana* dan kekuasaan *patron client*

Konsolidasi demokrasi dalam era otonomi daerah setelah era Orde Baru runtuh ditandai oleh beberapa kemajuan signifikan sebagai berikut: Pertama, penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD serta DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada tahun yang berjalan secara demokratis. Pemerintah daerah mempunyai andil penting dalam dan mendukung proses pemilu demokratis yang menghasilkan para anggota parlemen tersebut. Kedua, Pemerintah daerah berperan dalam membangun kondusifitas berjalannya sistem kepartaian di tingkat lokal sebagai sendi proses pelebagaan demokrasi. Ketiga, DPRD Provinsi

maupun DPRD Kabupaten/Kota menjadi mitra kritis pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Dampak relasi politik parlemen lokal dengan pemerintah daerah jelas meningkatkan akuntabilitas politik pemerintahan daerah. Keempat, pemilu sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal secara umum telah menghasilkan kepemimpinan efektif di daerah. Legitimasi kepemimpinan lokal, lebih kuat, dalam kerangka good local governance. Kelima, dalam konteks perkembangan demokrasi elektoral di tingkat lokal, nampak nyata pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat secara politik. Pemberdayaan politik rakyat (popular empowerment) sebagai esensi demokrasi tumbuh secara dinamis di tingkat lokal.

Tantangan terbesar dalam [kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik](#) adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah melaksanakan reformasi struktur politik, menyempurnakan proses politik dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi dapat berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai. Tantang lain yang dihadapi untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya menyepakati pentingnya konstitusi yang lebih demokratis. Proses perubahan yang sudah berlangsung selama 4 kali masih menyisahkan berbagai persoalan ketidaksempurnaan dalam hal filosofi maupun substansi konstitusional, terutama dalam kaitannya dengan kelembagaan dan penerapan nilai-nilai demokrasi secara luas

Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan seluruh masyarakat Indonesia yang bersatu padu dalam wadah NKRI. Tantangan utamanya adalah meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional dengan memperhatikan berbagai keanekaragaman latar belakang dan kondisi. Hal itu meliputi aspek desentralisasi, keadilan, sosial, serta sensitif politik yang belum tuntas penyelesaiannya, seperti masalah federalisme, masalah pemberlakuan syariat Islam, dan masalah hubungan negara dan agama. Tantangan lain dalam melaksanakan konsolidasi demokrasi adalah melaksanakan rekonsiliasi secara nasional untuk menyelesaikan dan menuntaskan persoalan-persoalan yang masih menggantung pada masa yang lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan politik yang dilakukan atas nama negara. Terkait dengan telah dirumuskannya format hubungan pusat dan daerah yang baru, tantangan ke depan adalah menciptakan hubungan pusat dengan daerah yang baru, tantangan ke depan adalah menciptakan hubungan kerja pusat dengan daerah yang benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan NKRI dan tetap menjaga berkembangnya iklim demokrasi hingga ke tingkat lokal atau dinamika di berbagai daerah.

Tantangan lain untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya mereformasi birokrasi sipil dan TNI-Polri. Konsolidasi demokrasi memerlukan pelaksanaan kebijakan yang reformis di dalam pemerintahan dan memerlukan dukungan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, kredibilitas dan kapasitas, serta efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, salah satu tantangan terbesar adalah masih belum kuatnya masyarakat sipil, baik dari segi ekonomi

maupun pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan, pendidikan politik akan menjadi alat transformasi sosial menuju demokrasi. Masyarakat sipil yang kuat sangat tergantung kepada kapasitas masyarakat dalam merespon dan memahami dinamika pasar global dan pasar dalam negeri serta saling berinteraksi antara negara, masyarakat sipil, dan pasar dalam mewujudkan negara yang demokratis. Tantangan lain untuk menjaga proses konsolidasi demokrasi adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagresasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan negara secara profesional.

### **5. Nilai Lokal dalam perwujudan persatuan dan Kesatuan**

Dengan keyakinan bahwa perubahan mendasar hanya akan terjadi kalau dimulai dari “desa/kampung” maka posisi dan peran masyarakat adat – penduduk pedesaan lainnya menjadi sangat penting, antara lain dengan terus-menerus membangun otonomi asli yang berakar pada budaya politik lokal dan kearifan adat. Menerapkan demokrasi partisipatif dalam pengambilan keputusan bersama di tingkat komunitas. Menumbuh-suburkan keberanian politik pemimpin-pemimpin lokal “merebut” hak politik komunitas adatnya untuk membangun kesepakatan-kesepakatan bersama di kalangan Masyarakat Adat yang terkait dengan “posisi Masyarakat Adat terhadap negara, modal dan nilai-nilai baru”. Dari kepemimpinan politik tingkat komunitas inilah Masyarakat Adat kemudian memperkuat dirinya memimpin perubahan pada tingkat yang lebih luas tingkat kabupaten, baru kemudian memasuki arena advokasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional.

Persatuan dan kesatuan akan mudah tercapai bila masyarakat sudah pada taraf yang sejahtera, kemakmuran akan membuat masyarakat lebih tenang dalam menjalankan semua kehidupannya. Jalan yang paling tepat adalah membuat masyarakat berdaulat, berdaulat dalam berbagai hal, termasuk berdaulat dalam mengekspresikan pola pikirnya. Kedaulatan maksudnya memberikan kebebasan namun tetap berada dalam kaidah-kaidah yang telah diatur oleh Undang-undang, karena selama ini pengalaman yang diambil ketika masyarakat dikebiri kebebasannya, masyarakat di pasung dalam melakukan berbagai hal, efeknya akan berlanjut panjang dan akan menyimpan bara dalam sekam, yang lama kelamaan akan memberikan dampak yang sangat besar dan tidak dapat diprediksi kapan akan meledak. Era orde baru merupakan contoh yang paling mudah untuk dikemukakan, rezim otoriter memegang kendali dari struktur paling tinggi hingga paling rendah, cengkraman otoritas yang dilakukan akhirnya membuat ingin bergerak tetapi tidak bisa.

Sistem otoriter yang diterapkan sangat membebani masyarakat yang ada di daerah terutama adanya aturan-aturan penyeragaman kebijakan. Penyeragaman kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan realisasi dari sistem sentralistik yang diterapkan, tidak ada kearifan lokal tata kelola pemerintah yang dipertahankan semua harus berada dalam satu komando pusat, dan terkenal namanya istilah “Jawanisasi” dimana semua orang di seluruh Indonesia dipaksa

untuk menggunakan berbagai atribut Jawa, dan hal tersebut mereduksi semua keanekaragaman yang ada di Indonesia, dan hal tersebut merupakan salah satu sifat menafikkan multikulturalisme di masyarakat.

Gelombang demokrasi dalam bentuk tuntutan reformasi di negara-negara tidak demokrasi, termasuk Indonesia pada era Orde Baru, menjadi ancaman bagi eksistensi ideologi nasional seperti Pancasila. Namun demikian, globalisasi juga melahirkan paradoksnya sendiri: di satu sisi globalisasi demokrasi mengakibatkan kebangkrutan banyak paham ideologi, di sisi yang lain juga mendorong bangkitnya nasionalisme lokal, bahkan dalam bentuknya yang paling dangkal dan sempit semacam *ethnonationalism*, atau bahkan *tribalism*. Gejala ini yang terus mengancam integrasi negara-negara majemuk dari sudut etnis, sosiokultural, dan agama seperti Indonesia. Gelombang demokratisasi yang melanda Indonesia bersamaan dengan krisis moneter, ekonomi, dan politik membuat Pancasila seolah kehilangan relevansinya.

Sementara itu proses desentralisasi dan otonomisasi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan. Apabila tidak diantisipasi, bukan tidak mungkin menumbuhkan sentimen *local-nationalism* yang dapat tumpang tindih dengan *ethnonationalism*. Dalam proses ini, Pancasila baik sengaja maupun akibat langsung dari proses desentralisasi akan makin kehilangan posisi sentralnya (Azyumardi Azra, 2008).

Kristalisasi nilai Pancasila sangat bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena pada dasarnya nilai-nilai Pancasila merupakan intisari dari nilai-nilai yang dipercayai di tengah masyarakat Indonesia yang berbudaya ini, Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Pancasila berperan sebagai pengatur sikap dan tingkah laku orang Indonesia masing-masing dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa (Sila-I), dengan sesama manusia (sila II) dengan tanah air dan nusa bangsa Indonesia (Sila-III) dengan kekuasaan dan pemerintahan negara (kerakyatan) dan dengan negara sebagai kesatuan dalam rangka realisasi kesejahteraan (sila-V). Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah Undang-Undang Dasar yaitu dalam pembukaan UUD'45, dalam mukadimah konstitusi RIS dan dalam mukadimah UUDS RI (1950). Pancasila tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu dan menjadi pegangan bersama pada saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap ekosistem bangsa kita, merupakan bukti sejarah bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia sebagai dasar kehormatan Indonesia, yaitu sebagai dasar negara, hal ini karena telah tertanam dalam kalbunya rakyat dan dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia serta merupakan ciri khas yaitu membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Terdapat kemungkinan, bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain, bersifat universal yang juga dimiliki bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi ke-5 sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah pula itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Kenyataan sehar-hari yang kita lihat dalam masyarakat bangsa Indonesia antara lain :

Bangsa Indonesia sejak dahulu sebagai bangsa yang religius, percaya akan adanya zat yang maha kuasa dan mempunyai keyakinan yang penuh, bahwa segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini akan ciptaan Tuhan. Dalam sejarah nenek moyang, kita ketahui bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu dimulai dari bentuk dinamisme (serba tenaga), lalu animisme (serba arwah), kemudian menjadi politeisme (serba dewa) dan akhirnya menjadi monoteisme (kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa) sisanya dalam bentuk peninggalan tempat-tempat pemujaan dan peribadatan upacara-upacara ritual keagamaan.

## **6. Kesimpulan**

Nilai-nilai lokal dapat menjadi acuan dan harapan dalam mengkonsolidasikan demokrasi di tingkat lokal, hal tersebut terbukti dari apa yang sudah dibahas di atas, dimana banyak bukti yang mengatakan bahwa nilai-nilai lokal wong kito dapat mengkonsolidasikan demokrasi di tingkat lokal, mereka masih setia menggunakan nilai-nilai lokal dalam kehidupan sehari-hari dengan acuan-acuan yang telah terlihat, nilai lokal dapat menjadi penengah dan dapat menjadi pagar dari masyarakat guna menghambat hal-hal buruk atau hal-hal yang sekiranya dapat memberikan efek buruk kepada masyarakat Palembang, mereka menjadi pembatas dan menjadi acuan ketika mereka mengalami permasalahan-permasalahan yang kapan saja dapat menghampiri kehidupan mereka. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai lokal masih bisa menjadi rujukan awal dan menjadi harapan di kemudian hari apabila ada masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara formal. Nilai lokal yang masih sangat bisa menjadi acuan dalam proses konsolidasi demokrasi harus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan mulai dari kepala daerah, DPRD hingga aktor-aktor lain yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk menjaga dan mempertahankan semua hal tersebut.

Banyak nilai-nilai lokal, yang masih dianut dan di implementasikan oleh masyarakat Palembang dalam kehidupan sehari-hari Umpak-umpakan, sedekah sanjo-sanjo, lelang, berasan dsb. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai kultural yang masih dijaga dan terjaga dalam kehidupan masyarakat Palembang, nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang bisa menunjang lahirnya berbagai macam kekuatan-kekuatan lokal yang mengarah kepada semakin kuatnya politik lokal, dalam hal ini kuatnya politik lokal ke arah yang lebih positif, mereka bisa mengatur kekuatan-kekuatan yang ada di tengah masyarakat menjadi kekuatan yang dapat mengintegrasikan segala perbedaan.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah nilai-nilai lokal dapat mempersatukan masyarakat, jawabannya sangat bisa dan sangat berpeluang dimanfaatkan, terutama di era demokrasi modern ini. Hampir sama dengan daerah-daerah lainnya nilai-nilai lokal mulai mendapatkan tempatnya ketika era Orde Baru runtuh, era desentralisasi dianggap sebagai ruh baru oleh masyarakat lokal untuk lebih aktif dan eksis dalam proses demokratisasi di tingkat lokal. Namun disini, perlu adanya peran berbagai pihak untuk merealisasikan harapan

tersebut, harus ada sinergitas antar semua pihak untuk tetap menjalankan dan mencapai cita-cita yang diamanatkan oleh desentralisasi, namun harus pada koridor yang memang telah ditentukan tidak ada yang namanya desentralisasi yang terlalu jauh, semua harus pada porsinya.

Kebijakan merupakan realisasi paling kongkrit dalam proses memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk berkembang, para pembuat kebijakan mulai dari kepala pemerintahan daerah, hingga DPRD. Kebijakan yang peka kebutuhan masyarakat lokal merupakan hal paling dekat yang bisa dilakukan oleh pemangku kebijakan, ketika kebijakan dapat dikeluarkan diharapkan semua pihak dapat menerima dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan hal tersebut dapat membuat rasa puas hati bagi masyarakat lokal, ketika mereka merasa dihadirkan dalam kontribusi bernegara, ketakutan-ketakutan akan lahirnya konflik di tengah masyarakat lama kelamaan akan memudar.

### Daftar Pustaka

- Abdilah, Ubed. (2002). *Politik Identitas Etnis: Pergulatan tanda tanpa identitas*. Magelang: Indonesia Tera
- Anderson, Benedict. 2001. *Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang*. Terjemahan Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Insist Press.
- Andriyani, Lusi. 2008. *Islam dan politik Identitas (studi Politik Identitas PKS di era reformasi) (Thesis)*. Universitas Airlangga
- Barker, Chris. 2000. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: Sage Publication Ltd
- Buchari, Sri Astuti. 2014. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Obor Indonesia
- Haboddin, Muhtar. *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. Jurnal Pemerintahan Volume 03, Nomor 01 Februari 2012
- Haris, Syamsudin (1994). *Demokrasi di Indonesia, Gagasan dan Pengalaman*. Jakarta: LP3Es
- Haryanto. 2015. *Politik Kain Timur (Instrumen Meraih Kekuasaan)*. Yogyakarta: Polgov
- Latif, Yudi. 2009. *Dalam Politik Identitas, Agama, Etnis*. Salatiga: Percik
- Maarif, Ahmad S. 2010. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Paramadina
- Patji, Abdul Rachman. 2002. *Etnisitas Dalam Konstruksi Identitas Lokal dan Nasional Studi Riau dan Mataram*. Jakarta: LIPI
- Thung, Julian. 2006. *Klaim, Kontestasi dan Konflik Identitas*. Jakarta: LIPI Press
- Purwanto. 2015. *Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif*. Jurnal Review politik Volum 05, Nomor 01, Juni 2015
- Sukanto, GM. 2010. *Politik Identitas (suatu kajian awal dalam kerangka dan interaksi "lokalitas" dan "globalisasi")*. Malang: UM press